

ABSTRAK

Penegakan hukum adalah upaya dilakukannya proses penegakan atau fungsi dari norma-norma hukum secara nyata untuk panduan perilaku di dalam hubungan hukum atau lalu lintas dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama terhadap pemutusan hubungan kerja yang terdapat dalam perjanjian kerja bersama pasal pasal 109 ayat (3) a butir 3 huruf j PKB (*vide* bukti P-15). Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana terjadinya pemutusan hubungan kerja dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisis bagaimana terjadinya pemutusan hubungan kerja dan bagaimana pertimbangan Hakim dalam putusan nomor 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Adapun hasil penelitian penulis adalah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang ada di Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) merupakan azas *lex speialis* dengan *lex generally* adalah azas penafsiran yang menyatakan bahwa yang bersidat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Kasus ini menggunakan peraturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) pada pasal 108 ayat (45) yang hanya dilaksanakan oleh pegawai/karyawan Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) tidak bisa dipergunakan oleh umum atau pegawai diluar dari Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI).

Kata kunci : Pemutusan Hubungan Kerja, Perjanjian Kerja Bersama, Pekerja

ABSTRACT

Law enforcement is an effort to carry out a real enforcement process or function of legal norms to guide behavior in legal relations or traffic in social life in order to obtain mutual agreement on termination of employment contained in the collective labor agreement article 109 paragraph (3) a point 3 letter j PKB (vide evidence P-15). The problems in this study are how the termination of employment occurs and how the judges consider in the case of decision number 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016. The purpose of this study is to find out, explain and analyze how the termination of employment occurs and how the judges consider in the case of decision number 536 K/Pdt.Sus-PHI/2016. The research method used in this study is a normative juridical research method with a statutory approach and a fact approach. The results of the author's research are the case of Termination of Employment (PHK) in Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (PERURI) is the principle of lex specialis with lex generally is the principle of interpretation which states that the special nature (lex specialis) overrides the law of a general nature (lex generalis). This means that this case uses the Collective Labor Agreement (PKB) regulations in article 108 paragraph (45) which are only implemented by employees of the Republic of Indonesia Money Printing Corporation (PERURI) and cannot be used by the public or employees outside of the Republic of Indonesia Money Printing Corporation (PERURI).

Keywords: Termination of Employment, Collective Labor Agreement, Labor